

NEGOSIASI PENDIDIKAN ISLAM DAN NEGARA PADA MASA ORDE LAMA: KAJIAN HISTORIS MADRASAH DAN PESANTREN

Abdur Rohman¹, Shodrus Syahid², M. Bustomi³, Anang Sholikhuddin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Yudharta Pasuruan,

Email: aaababdrohman@gmail.com¹, sodrusyahid555@gmail.com²,
tomi89610@gmail.com³

Abstract

Keywords:

Educational Negotiation,
Old Order, Madrasah,
Pesantren, National
Education System

This study examines the negotiation process between the state and Islamic educational institutions—particularly madrasah and pesantren—during the Old Order period (1945–1965). Employing a historical approach through library research, this study analyzes how government policies toward Islamic education were formulated and how madrasah and pesantren responded through institutional adaptation. The concept of "educational negotiation" is used as an analytical tool to examine the reciprocal relationship between the state's interest in building a national education system and the Muslim community's aspiration to preserve religious education. The findings reveal that the relationship between the state and Islamic educational institutions was not subordinative but negotiative, resulting in the formal recognition of madrasah and the modernization of pesantren as the foundation of Islamic education in Indonesia.

Abstrak

Kata Kunci :

Negosiasi Pendidikan,
Orde Lama, Madrasah,
Pesantren, Sistem
Pendidikan Nasional

Penelitian ini mengkaji proses negosiasi antara negara dan lembaga pendidikan Islam—khususnya madrasah dan pesantren—pada masa Orde Lama (1945–1965). Menggunakan pendekatan historis dengan metode studi kepustakaan (library research), penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam terbentuk dan bagaimana madrasah serta pesantren merespons kebijakan tersebut melalui adaptasi kelembagaan. Konsep "negosiasi pendidikan" digunakan sebagai alat analisis untuk melihat hubungan timbal balik antara kepentingan negara membangun pendidikan nasional dan aspirasi umat Islam mempertahankan pendidikan keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara negara dan lembaga pendidikan Islam tidak bersifat subordinatif melainkan negosiatif, yang

menghasilkan pengakuan formal terhadap madrasah dan modernisasi pesantren sebagai fondasi sistem pendidikan Islam di Indonesia. Temuan ini memperkaya kajian sejarah pendidikan Islam Indonesia dengan menawarkan perspektif analitis yang lebih nuansis tentang dinamika politik pendidikan pada era kemerdekaan.

PENDAHULUAN

Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 membuka babak baru dalam dinamika pendidikan Islam di Nusantara. Setelah berabad-abad berkembang secara otonom di bawah tekanan kolonialisme Belanda, lembaga-lembaga pendidikan Islam—terutama madrasah dan pesantren—dihadapkan pada realitas baru: keharusan untuk bernegosiasi dengan negara yang baru lahir dalam proses perumusan sistem pendidikan nasional. Periode 1945–1965, yang dikenal sebagai masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, menjadi arena kontestasi sekaligus akomodasi antara visi negara tentang pendidikan nasional yang terintegrasi dan aspirasi umat Islam untuk mempertahankan identitas keislaman dalam institusi pendidikannya. Warisan kolonial meninggalkan dualisme pendidikan yang tajam: di satu sisi, sekolah-sekolah formal bergaya Barat yang diselenggarakan pemerintah kolonial; di sisi lain, madrasah dan pesantren yang tumbuh di bawah naungan komunitas Muslim. Ketika kemerdekaan diproklamasikan, dualisme ini tidak serta merta terhapuskan, melainkan menjadi persoalan struktural yang harus diselesaikan oleh negara baru. Pemerintah Orde Lama menghadapi dilema mendasar: bagaimana membangun sistem pendidikan nasional yang kohesif tanpa mengabaikan peran signifikan lembaga pendidikan Islam yang telah berakar kuat dalam masyarakat.

Kajian tentang pendidikan Islam pada masa Orde Lama telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Studi-studi terdahulu umumnya berfokus pada aspek perkembangan historis madrasah (Ahmad et al., 2026), kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam (Luthfiyani & Sirozi, 2023), atau sejarah institusional pesantren (Chasanah & Roqib, 2025). Meskipun kontribusi penelitian-penelitian tersebut tidak dapat diabaikan, terdapat celah analitis yang belum terjamah secara memadai, yakni bagaimana proses negosiasi antara negara dan lembaga pendidikan Islam berlangsung secara konkret, dan bagaimana madrasah serta pesantren mampu mempertahankan identitas keislamannya sekaligus menyesuaikan diri dengan tuntutan integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengajukan konsep "negosiasi pendidikan" sebagai alat analisis yang lebih tajam dan spesifik. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang cenderung menempatkan lembaga pendidikan Islam sebagai objek pasif kebijakan negara, penelitian ini memandang madrasah dan pesantren sebagai aktor aktif yang mampu melakukan adaptasi strategis dan negosiasi kelembagaan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang berarti bagi kajian sejarah pendidikan Islam Indonesia sekaligus memperkaya pemahaman tentang dinamika relasi negara-masyarakat sipil keagamaan pada periode awal kemerdekaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama

Kajian mengenai pendidikan Islam pada masa Orde Lama umumnya menyoroti perkembangan kelembagaan madrasah dan pesantren setelah Indonesia merdeka. Menurut Ichsan (2021), periode 1945–1965 merupakan fase penting dalam sejarah pendidikan Islam karena negara mulai memberikan perhatian terhadap lembaga pendidikan keagamaan melalui pembentukan Kementerian Agama. Kebijakan tersebut membuka ruang bagi pendidikan Islam untuk memperoleh pengakuan yang lebih luas dalam sistem pendidikan nasional. (Salsabila et al., 2021). Penelitian Kurniawan dan Faridi (2026) menjelaskan bahwa madrasah mengalami perkembangan signifikan melalui proses penyesuaian kurikulum dan administrasi agar sesuai dengan standar pendidikan nasional. Sementara itu, pesantren tetap mempertahankan karakter tradisionalnya, meskipun secara bertahap mulai mengadopsi unsur-unsur pendidikan modern. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam pada masa Orde Lama tidak berada dalam kondisi statis, melainkan mengalami transformasi sebagai respons terhadap perubahan sosial dan politik nasional. (Ahmad et al., 2026). Lebih lanjut, Olivia, Zulmuqim, dan Masyhudi (2024) menegaskan bahwa pembaruan pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan menjadi fondasi penting bagi perkembangan madrasah dan pesantren pada periode-periode berikutnya. Oleh karena itu, masa Orde Lama dapat dipahami sebagai fase awal integrasi pendidikan Islam ke dalam kerangka pendidikan nasional Indonesia. (Penelitian & Pemikiran, 2024).

Relasi Negara dan Pendidikan Islam

Hubungan antara negara dan pendidikan Islam merupakan salah satu tema penting dalam kajian sejarah pendidikan Indonesia. Luthfiyani dan Sirozi (2023) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Lama dipengaruhi oleh dinamika politik antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Negara berupaya membangun sistem pendidikan nasional yang terintegrasi, sementara kelompok Islam berusaha memastikan bahwa pendidikan agama tetap memperoleh tempat yang layak dalam sistem tersebut. Dalam perspektif historis, relasi negara dan pendidikan Islam tidak selalu bersifat konfrontatif. Shah, Rohmad, dan Alai (2026) menunjukkan bahwa perkembangan madrasah dan pesantren di Indonesia berlangsung melalui proses interaksi yang kompleks antara kebijakan negara dan kebutuhan masyarakat Muslim. Melalui interaksi tersebut, lembaga pendidikan Islam mampu memperoleh pengakuan formal tanpa kehilangan seluruh karakter keislamannya. Kajian Zibbat dan Hariri (2024) juga menunjukkan bahwa pengakuan negara terhadap pendidikan Islam merupakan hasil proses panjang yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari ulama, organisasi Islam, hingga birokrasi pemerintah. Dengan demikian, relasi negara dan pendidikan Islam lebih tepat dipahami sebagai hubungan yang dinamis dan saling memengaruhi.

Konsep Negosiasi Pendidikan dalam Kajian Pendidikan Islam

Konsep negosiasi dalam pendidikan merujuk pada proses interaksi antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda dalam menentukan arah dan bentuk suatu sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, negosiasi terjadi ketika lembaga pendidikan Islam berusaha mempertahankan identitas keagamaannya sekaligus

menyesuaikan diri dengan tuntutan kebijakan negara.

Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung menempatkan madrasah dan pesantren sebagai objek kebijakan pemerintah. Pendekatan tersebut terlihat dalam studi-studi yang berfokus pada regulasi, kurikulum, atau kebijakan pendidikan Islam. Namun, pendekatan demikian sering kali kurang memberikan perhatian pada kemampuan lembaga pendidikan Islam dalam merespons dan memengaruhi kebijakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan konsep *negosiasi pendidikan* untuk melihat madrasah dan pesantren sebagai aktor yang memiliki kapasitas adaptasi dan daya tawar dalam menghadapi kebijakan negara. Melalui perspektif ini, hubungan antara negara dan pendidikan Islam dipahami sebagai proses timbal balik yang menghasilkan kompromi, penyesuaian, dan transformasi kelembagaan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional pada masa Orde Lama.

Kerangka Berpikir Penelitian

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kebijakan pendidikan pemerintah Orde Lama tidak hanya memengaruhi perkembangan madrasah dan pesantren, tetapi juga mendorong munculnya proses negosiasi antara negara dan lembaga pendidikan Islam. Kebijakan integrasi pendidikan nasional menuntut adanya penyesuaian kelembagaan, sementara madrasah dan pesantren berupaya mempertahankan identitas keislamannya. Proses negosiasi tersebut menghasilkan berbagai bentuk adaptasi, seperti perubahan kurikulum, penguatan legitimasi kelembagaan, serta pengembangan hubungan antara ulama dan pemerintah. Hasil akhir dari proses tersebut adalah meningkatnya pengakuan negara terhadap pendidikan Islam dan semakin kuatnya posisi madrasah serta pesantren dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis (*historical approach*). Secara metodologis, penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni penggalian data dari berbagai sumber tertulis yang relevan, mencakup arsip kebijakan, dokumen resmi negara, karya-karya ilmiah, dan literatur sejarah pendidikan Islam Indonesia.

Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti tahapan metodologi historis yang terdiri atas empat langkah:

1. **Heuristik:** proses pengumpulan dan inventarisasi sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Lama, meliputi sumber primer (dokumen resmi, kebijakan, peraturan perundang-undangan) dan sumber sekunder (buku, artikel ilmiah, laporan penelitian).
2. **Kritik Sumber:** evaluasi terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber yang ditemukan, baik secara internal (isi dan substansi sumber) maupun eksternal (kondisi fisik dan asal-usul sumber).
3. **Interpretasi:** penafsiran dan analisis terhadap fakta-fakta sejarah yang diperoleh, termasuk mengidentifikasi pola negosiasi yang terjadi antara negara dan lembaga pendidikan Islam.

4. **Historiografi:** penulisan narasi sejarah yang bersifat analitis dan interpretatif berdasarkan temuan penelitian, dengan mempertimbangkan konteks sosial-politik yang melatarinya.

Sumber data utama penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan terkait pendidikan Islam pada era 1945–1965, dokumen kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, serta literatur akademik yang diterbitkan dalam rentang lima tahun terakhir (2021–2026) sebagai kerangka analisis kontemporer. Triangulasi sumber dilakukan untuk memastikan validitas temuan.(Salsabila et al., 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan Indonesia

1. Kondisi Pendidikan Islam Setelah 1945

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menghadirkan momentum transformatif bagi pendidikan Islam. Madrasah dan pesantren yang selama ini berkembang dalam tekanan dan keterbatasan infrastruktur kolonial kini mendapatkan ruang gerak yang lebih luas. Namun demikian, kondisi fisik dan kelembagaan lembaga-lembaga tersebut masih sangat memprihatinkan. Banyak pesantren yang rusak akibat konflik fisik selama periode revolusi, sementara tenaga pengajar yang terlatih pun masih sangat terbatas. Di sisi lain, semangat kebangsaan yang menggelora justru menjadi energi bagi kalangan santri dan ulama untuk turut berpartisipasi aktif dalam membangun pendidikan nasional.(Salsabila et al., 2021)

2. Warisan Sistem Pendidikan Kolonial

Sistem pendidikan yang diwarisi dari era kolonial Belanda membentuk struktur dualisme yang problematis. Pemerintah Hindia Belanda secara sistematis membangun sekolah-sekolah formal dengan orientasi sekuler dan Barat, sementara pendidikan Islam dibiarkan berkembang di luar jalur pemerintahan—bahkan dalam beberapa periode aktif dibatasi. Kebijakan *Ordonansi Guru* (1905) dan *Ordonansi Sekolah Liar* (1932), misalnya, merupakan instrumen kolonial yang secara eksplisit membatasi perkembangan madrasah dan pesantren (Syah et al., 2024). Warisan kebijakan diskriminatif ini menciptakan jurang struktural antara pendidikan formal dan pendidikan Islam yang terus menjadi persoalan pada masa kemerdekaan.

3. Dualisme Pendidikan Agama dan Pendidikan Umum

Dualisme pendidikan yang diwarisi dari masa kolonial tidak serta-merta diselesaikan setelah kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam merumuskan sistem pendidikan terpadu yang mampu mengakomodasi dua tradisi pendidikan yang berbeda secara epistemologis: pendidikan umum yang berorientasi pada ilmu-ilmu sekuler dan pendidikan Islam yang berpijak pada khazanah keilmuan keagamaan. Ketegangan antara dua kutub ini bukan sekadar persoalan teknis kurikuler, melainkan mencerminkan perbedaan ideologis yang lebih mendasar tentang tujuan dan orientasi pendidikan nasional (Penelitian & Pemikiran, 2024).

Kebijakan Negara terhadap Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama

1. Pembentukan Kementerian Agama Republik Indonesia

Salah satu kebijakan paling signifikan pemerintah Orde Lama dalam konteks pendidikan Islam adalah pembentukan Kementerian Agama pada 3 Januari 1946. Lembaga ini menjadi representasi kelembagaan pertama negara terhadap urusan keagamaan, termasuk pendidikan Islam. Pendirian Kementerian Agama merupakan hasil kompromi politik antara kelompok nasionalis sekuler dan kelompok Islam dalam perdebatan mengenai dasar negara dan arsitektur kelembagaan negara. Melalui institusi ini, pemerintah mengakui secara formal bahwa pendidikan agama merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional (Luthfiyani & Sirozi, 2023). Kementerian Agama kemudian menjadi motor penggerak formalisasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Di bawah naungan kementerian ini, madrasah mulai mendapatkan perhatian kelembagaan, meski dalam batas-batas tertentu yang mencerminkan keterbatasan anggaran negara dan kompleksitas politik saat itu.

2. Kebijakan Madrasah dan Integrasi Kurikulum

Pada dekade 1950-an, pemerintah mulai merumuskan kebijakan yang lebih sistematis terhadap madrasah. Salah satu tonggak penting adalah diterbitkannya ketentuan tentang standar minimal kurikulum madrasah yang memasukkan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum. Kebijakan ini mencerminkan upaya negara untuk mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional tanpa menghapus identitas keislamannya. Meski demikian, implementasinya di lapangan tidak seragam—madrasah di berbagai daerah merespons dengan cara yang berbeda-beda, bergantung pada konteks lokal dan kapasitas kelembagaan masing-masing (Kurniawan & Faridi, 2026).

3. Pendidikan Agama di Sekolah Umum

Perdebatan tentang pendidikan agama di sekolah umum menjadi salah satu arena negosiasi politik yang paling alot pada masa Orde Lama. Kelompok Islam memperjuangkan agar pendidikan agama dijadikan mata pelajaran wajib di seluruh sekolah negeri, sementara kelompok nasionalis sekuler menolak atau menginginkan sifatnya yang opsional. Kompromi yang dicapai melalui Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1949 dan diperkuat oleh berbagai regulasi berikutnya menempatkan pendidikan agama sebagai bagian dari kurikulum sekolah umum, meski dengan berbagai catatan dan pengecualian. (Masa et al., 2018)

4. Perkembangan Perguruan Tinggi Islam

Periode Orde Lama juga menyaksikan perkembangan penting dalam pendidikan tinggi Islam. Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) pada tahun 1950 dan kemudian transformasinya menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada tahun 1960 merupakan pencapaian signifikan dalam upaya melembagakan pendidikan Islam pada jenjang tinggi. Langkah ini mencerminkan pengakuan negara terhadap pentingnya pengembangan sumber daya manusia Muslim yang terdidik secara formal (Masyhudi, n.d.)

Negosiasi Madrasah dan Pesantren terhadap Kebijakan Negara

Bagian ini merupakan inti dari novelty penelitian. Alih-alih memandang madrasah dan pesantren sebagai lembaga yang secara pasif menerima kebijakan negara, penelitian ini membuktikan bahwa kedua institusi tersebut melakukan serangkaian strategi negosiasi yang cerdas dan adaptif dalam merespons tekanan integrasi.

1. Adaptasi Kurikulum sebagai Strategi Negosiasi

Salah satu bentuk negosiasi paling konkret yang dilakukan madrasah adalah adaptasi kurikulum. Madrasah tidak serta-merta menolak tuntutan negara untuk memasukkan mata pelajaran umum, namun juga tidak menerimanya begitu saja. Proses negosiasi terjadi dalam ruang antara—madrasah memasukkan pelajaran umum ke dalam kurikulum namun tetap mempertahankan porsi dominan pelajaran agama. Model kompromi ini menciptakan identitas kurikuler yang khas: madrasah sebagai institusi pendidikan Islam yang juga mengajarkan ilmu-ilmu umum (Pendidikan, 2022)

Dalam konteks pesantren, adaptasi berlangsung lebih gradual dan tidak seragam. Pesantren-pesantren besar dan berpengaruh umumnya lebih mampu bernegosiasi dari posisi yang kuat, sementara pesantren-pesantren kecil cenderung mengikuti arus kebijakan yang berlaku. Namun demikian, hampir semua pesantren berhasil mempertahankan elemen-elemen inti pendidikan keislaman mereka, seperti pengajian kitab kuning, pembinaan akhlak, dan pembiasaan ibadah (Olivia et al., 2024).

2. Legitimasi Kelembagaan: Dari Pinggiran ke Sistem

Negosiasi bukan hanya tentang kurikulum, tetapi juga tentang legitimasi kelembagaan. Madrasah dan pesantren berjuang agar diakui secara setara dengan sekolah umum dalam sistem pendidikan nasional. Strategi yang ditempuh antara lain melalui jalur organisasi—terutama melalui organisasi-organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang memiliki jaringan madrasah dan pesantren yang luas. Kedua organisasi ini menjadi perantara negosiasi antara lembaga pendidikan Islam di akar rumput dengan aparatur negara di tingkat pusat (Luthfiyani & Sirozi, 2023).

3. Hubungan Ulama dan Pemerintah dalam Proses Negosiasi

Peran ulama dalam proses negosiasi pendidikan tidak dapat diabaikan. Ulama tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin keagamaan di lingkungan madrasah dan pesantren, tetapi juga sebagai negosiator politik yang cakap dalam berhadapan dengan aparatur negara. Di banyak kasus, ulama berhasil memanfaatkan posisi mereka sebagai tokoh masyarakat yang disegani untuk mendorong kebijakan yang lebih mengakomodatif terhadap pendidikan Islam. Keterlibatan ulama dalam Kementerian Agama juga menjadi mekanisme negosiasi yang efektif dari dalam sistem birokrasi (Ichsan, 2021).

4. Strategi Mempertahankan Identitas Pendidikan Islam

Identitas keislaman dalam pendidikan Islam dipertahankan melalui berbagai strategi yang saling melengkapi. Pertama, pemisahan ruang simbolis: madrasah dan pesantren mempertahankan simbol-simbol keislaman yang kuat, seperti

penggunaan bahasa Arab, pakaian santri, dan ritual keagamaan sehari-hari, sehingga identitasnya tetap terbaca meski secara administratif berada di bawah pengawasan negara. Kedua, kedalaman substansi kurikulum agama: meskipun mata pelajaran umum ditambahkan, bobot dan kedalaman pengajaran agama tetap dipertahankan bahkan diperkuat. Ketiga, jaringan alumni: pesantren membangun jaringan alumni yang kuat yang kemudian menjadi agen negosiasi di berbagai lapisan masyarakat dan birokrasi (Ahmad et al., 2026).

Dampak Negosiasi terhadap Sistem Pendidikan Nasional

1. Pengakuan Formal Pendidikan Islam

Hasil paling nyata dari proses negosiasi panjang antara negara dan lembaga pendidikan Islam pada masa Orde Lama adalah diperolehnya pengakuan formal terhadap madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Meskipun pengakuan ini belum sepenuhnya setara dengan sekolah umum dari segi anggaran dan fasilitas, secara kelembagaan posisi madrasah telah berubah: dari institusi pendidikan yang berada di luar sistem menjadi bagian dari sistem yang diakui negara. Pengakuan ini meletakkan fondasi bagi perkembangan madrasah pada dekade-dekade berikutnya (Zalnur, n.d.)

2. Modernisasi Pesantren

Tekanan integrasi dari negara mendorong terjadinya modernisasi pesantren secara organik. Pesantren-pesantren yang semula hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama mulai memperkenalkan pelajaran umum dan keterampilan vokasional. Muncullah model pesantren modern yang menggabungkan tradisi pengajaran kitab kuning dengan kurikulum formal pendidikan umum. Transformasi ini, meskipun tidak lepas dari kontroversi di internal komunitas pesantren, pada akhirnya memperluas jangkauan dan relevansi pesantren dalam masyarakat Indonesia yang semakin modern (Penelitian & Pemikiran, 2024).

3. Fondasi Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Berikutnya

Pengalaman negosiasi pada masa Orde Lama meninggalkan warisan kelembagaan yang signifikan bagi perkembangan pendidikan Islam pada era selanjutnya. Pola-pola negosiasi yang terbentuk—baik berupa kompromi kurikulum, pengakuan kelembagaan, maupun mekanisme representasi ulama dalam birokrasi pendidikan—menjadi kerangka acuan bagi kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru dan era Reformasi. Dengan demikian, periode Orde Lama dapat dipahami sebagai era pembentukan identitas kelembagaan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia (Masyhudi, n.d.).

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menganalisis proses negosiasi antara negara dan lembaga pendidikan Islam—khususnya madrasah dan pesantren—pada masa Orde Lama (1945–1965). Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Pertama, kebijakan pemerintah Orde Lama terhadap pendidikan Islam bersifat ambivalen namun progresif. Di satu sisi, negara berupaya mengintegrasikan madrasah dan pesantren ke dalam sistem pendidikan nasional yang terpadu; di sisi lain, negara

mengakui peran strategis lembaga pendidikan Islam dalam membentuk karakter bangsa. Pembentukan Kementerian Agama, kebijakan kurikulum madrasah, dan pendirian perguruan tinggi Islam negeri merupakan bukti nyata dari pengakuan tersebut, meski implementasinya seringkali tidak konsisten akibat kompleksitas politik dan keterbatasan sumber daya.

Kedua, madrasah dan pesantren merespons kebijakan negara bukan dengan resistensi pasif atau ketundukan total, melainkan melalui strategi negosiasi yang adaptif dan cerdas. Adaptasi kurikulum, pembangunan legitimasi kelembagaan melalui organisasi Islam, pemanfaatan jaringan ulama dalam birokrasi, dan pemertahanan identitas keislaman melalui simbol-simbol budaya merupakan manifestasi dari kemampuan lembaga-lembaga ini untuk bernegosiasi dari posisi yang relatif kuat.

Ketiga, proses negosiasi yang berlangsung selama periode Orde Lama menghasilkan transformasi signifikan dalam posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Dari sebuah sistem pendidikan yang berada di pinggiran—tidak diakui dan tidak didukung negara—madrasah dan pesantren berhasil memperoleh legitimasi formal sebagai bagian integral dari pendidikan nasional Indonesia. Transformasi ini tidak sepenuhnya menguntungkan bagi lembaga pendidikan Islam, karena integrasi ke dalam sistem negara juga membawa konsekuensi berupa standarisasi dan pengawasan yang lebih ketat. Namun demikian, secara keseluruhan, proses negosiasi ini telah memperkuat fondasi pendidikan Islam Indonesia dan meletakkan dasar bagi perkembangannya yang lebih lanjut pada era-era berikutnya.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada kajian sejarah pendidikan Islam Indonesia dengan menawarkan konsep "negosiasi pendidikan" sebagai alat analitis yang lebih dinamis dan berimbang dalam memahami relasi negara-masyarakat sipil keagamaan. Konsep ini dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji dinamika pendidikan Islam pada periode Orde Baru dan Reformasi, serta dalam konteks perbandingan dengan negara-negara Muslim lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., Shah, A., Rohmad, A., & Alai, A. (2026). *Socio-Historical Dynamics of Islamic Education in the Indonesian Archipelago : The Institutional Evolution of Pesantren and Madrasah*. 22(1), 96–110.
- Luthfiyani, A., & Sirozi, M. (2023). *Politik Pendidikan Islam di Indonesia Pada Masa Orde Lama*. 10(1), 38–44.
- Masa, D., Hingga, K., Baru, O., Khafidz, M., & Raya, F. (2018). *Jurnal Pendidikan Islam*. 08, 228–242.
- Masyhudi, F. (n.d.). *SEJARAH SERTA DINAMIKA PEMBAHARUAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA (SURAU , PESANTREN DAN MADRASAH)*. 6, 54–69.
- No Title. (2025). 10(September).
- Pendidikan, J. (2022). *An-Nafah*. 2(2), 100–109.
- Penelitian, J., & Pemikiran, D. A. N. (2024). *EKSISTENSI PENDIDIKAN PESANTREN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-*

UNDANG PESANTREN. 11(1), 103–117.

Salsabila, S. S., Ichsan, Y., Rohmadani, A. I., & Mahmudah, S. R. (2021). *Implikasi Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Zaman Orde Lama , Baru , Dan Reformasi*. 8(2), 8–15.

Zalnur, M. (n.d.). *STUDI KRITIS TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAHAN ORDE LAMA , ORDE BARU , DAN ERA*. 1(2023), 1404–1423.